

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan

Vol.XIII/No.2/Juni 2018

ISSN: 0126-4605



Penerapan Soal Model Penalaran Dalam Ujian Nasional: Apa dan Mengapa?

Selamat datang Bapak,
Kami Ingin Maju Bersama

**Penerapan Soal Model Penalaran dalam Ujian Nasional
Perlu Diimbangi dengan Peningkatan
Kemampuan Guru dan Siswa**

DAFTAR ISI

- 3 **PENERAPAN SOAL MODEL
PENALARAN DALAM UJIAN
NASIONAL: APA DAN MENGAPA?**
- 7 **SELAMAT DATANG BAPAK, KAMI
INGIN MAJU BERSAMA**
- 11 **PENERAPAN SOAL MODEL
PENALARAN DALAM UJIAN
NASIONAL PERLU DIIMBANGI
DENGAN PENINGKATAN
KEMAMPUAN GURU DAN SISWA**
- 14 **HARAP TENANG ADA UJIAN
NASIONAL**
- 17 **PUSPENDIK LAKUKAN REVIU KISI-
KISI USBN**
- 19 **SEBANYAK 197 PENULIS ANTUSIAS
IKUT PELATIHAN PENULISAN BUKU
TEKS PELAJARAN DI SOLO**
- 22 **BSNP DAN PUSKURBUK
MELAKSANAKAN PELATIHAN
PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN
BAGI 467 GURU DAN DOSEN**
- 24 **LENSA BSNP**

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman. Alhamdulillah, Ujian Nasional (UN) telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan UN tahun 2018 berjalan dengan lancar dan kondusif. Sekolah pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) mengalami peningkatan secara drastis. UNBK telah terbukti efektif dalam meningkatkan indeks integritas bagi siswa dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan ujian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai memperkenalkan soal model penalaran atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dalam Ujian Nasional. Pada edisi ini, Buletin BSNP mengangkat topik tentang penerapan soal model penalaran dan pemantauan UN di beberapa daerah. Lensa BSNP dalam bentuk foto, juga kami sajikan untuk melengkapi edisi ini. Selamat membaca.

Gambar Sampul: *Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan kepada Ketua OSIS SMK Stella Marris Labuan Bajo NTT, se usai memantau pelaksanaan UN SMK. (Dokumentasi BKLM, Kemdikbud)*

Buletin BSNP
Buletin Resmi Badan Standar Nasional Pendidikan

Penanggungjawab
Bambang Suryadi

Pemimpin Redaksi
Kiki Yulianti

Redaksi Eksekutif
Zainal A. Hasibuan
Nanang Arif Guntoro
Zaki Su'ud
Khomsiyah

Redaksi Pelaksana
Teuku Ramli Zakaria

Penyunting/Editor
Titi Savitri Prihatiningsih
Ipung Yuwono
Djoko Luknanto

Desain Grafis & Fotografer
Arief Rifai Dwiyanto
Ibar Warsita
Fiqih Trihanda

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih
Nurul Najmah

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen, Jl. RS.
Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan

Email: info@bsnp-indonesia.org

Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591

Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Penerapan Soal Model Penalaran Dalam Ujian Nasional: Apa dan Mengapa?

Ujian Nasional (UN) untuk pendidikan formal dan nonformal, pada jenjang SMP dan SMA sederajat telah selesai diselenggarakan pada bulan April dan Mei 2018. Pengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan untuk jenjang SMA dan SMK pada tanggal 3 Mei 2018 dan untuk jenjang SMP sederajat pada tanggal 28 Mei 2018. Meskipun UN sudah selesai, masih ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya adalah kebijakan memperkenalkan soal model penalaran atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang mendapat berbagai respon dari peserta UN dan masyarakat.

Nah, untuk mengulas lebih lanjut, apa itu soal model HOTS dan mengapa Pemerintah memperkenalkan soal tersebut, Buletin BSNP melakukan wawancara dengan Ketua BSNP Bambang Suryadi. Berikut ini petikan wawancara tersebut yang disampaikan dengan gaya bertutur.

Bisa Bapak jelaskan, apa sebenarnya arti soal model penalaran?

Soal model penalaran juga disebut dengan soal model *Higher Order Thinking Skills* (HOTS), yaitu soal yang memerlukan kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*).

Ada beberapa prinsip penyusunan soal yang mengarah kepada HOTS, yaitu (1) mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, meminimalkan

aspek mengingat dan memahami; (2) berbasis permasalahan kontekstual; dan (3) memiliki stimulus menarik.

Soal model HOTS mengukur kemampuan siswa dalam hal (1) transfer satu konsep ke konsep lainnya; (2) memproses dan menerapkan informasi; (3) mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda; (4) menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah; dan (5) menelaah ide dan informasi secara kritis.

Bisa dijelaskan, apa maksud kontekstual dan stimulus?

Kontekstual artinya soal harus menggunakan konteks dunia nyata. Penyajian kasus nyata memungkinkan peserta didik melakukan proses menelaah berbagai informasi. Sedangkan stimulus yang menarik dapat berupa beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana dll yang memiliki keterkaitan dalam sebuah kasus.



Siswa SMA mengerjakan soal Matematika pada hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Mulai tahun 2018 terdapat soal isian singkat dalam UN untuk mata pelajaran Matematika SMA/MA, SMK/MAK, dan Program Paket C/Ulya

Stimulus hendaknya menuntut kemampuan menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, atau menciptakan.

Apakah soal sulit itu dapat disebut soal model penalaran?

Istilah sulit itu tidak sama dengan soal model penalaran. Kata ahli pengukuran: “*Difficulty is NOT the same as higher-order thinking*”. Jadi tidak semua soal yang sulit itu bisa dikategorikan soal model penalaran. Tetapi soal model penalaran mesti sulit karena tidak hanya sekedar mengukur kemampuan berpikir level pemahaman dan penalaran, tetapi mengukur level evaluasi. Sebagai contoh, mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin sulit, tetapi ini bukanlah *Higher-Order Thinking* kecuali melibatkan proses bernalar (seperti mencari arti dari konteks/stimulus).

Sejak kapan Pemerintah memperkenalkan soal model penalaran dalam UN?

Semangat yang ada di dalam Kurikulum

2013 adalah melatih siswa untuk berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Artinya, soal model penalaran itu sebenarnya sudah dikenalkan sejak 2013 yang lalu. Namun dalam prosesnya, belum sepenuhnya diterapkan secara optimal.

Adapun penggunaan soal model penalaran dalam UN, sudah dimulai sejak tahun 2016. Namun ketika itu, model soal masih dalam bentuk pilihan ganda semua. Baru pada tahun 2018 khusus untuk mata pelajaran Matematika SMA/MA, SMK dan Paket C/Ulya, ada soal model isian singkat.

Mengapa asesmen di Indonesia diarahkan ke model asesmen Higher Order Thinking Skills (HOTS)?

Asesmen dengan soal model penalaran atau HOTS ini dilakukan untuk mengejar keterbelakangan bangsa Indonesia di tingkat internasional, khususnya hasil Program for International Student Assessment (PISA). Selama

ini hasil PISA Indonesia selalu berada pada posisi sangat rendah. Sebagai contoh, hasil PISA 2012 menunjukkan mayoritas siswa usia 15 tahun belum memiliki literasi dasar (membaca, matematika, sains). Kemampuan Matematika, 75% siswa di bawah kompetensi minimum dan kemampuan membaca, 56% siswa di bawah kompetensi minimum.

Kemampuan bernalar merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatifitas, komunikasi, dan kolaborasi. Anak-anak kita tidak akan berdaya

Anak-anak kita tidak akan berdaya saing bila di sekolah mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad 21, misalnya membuat perbandingan, menganalisis data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata serta pada situasi yang baru.

**--Bambang Suryadi
Ketua BNSP--**

saing bila di sekolah mereka tidak dilatih kecakapan hidup abad 21, misalnya: untuk membuat perbandingan, menganalisis data, berpikir kritis, membuat kesimpulan, memecahkan masalah dan menerapkan pengetahuan mereka pada konteks kehidupan nyata serta pada situasi yang baru.

Jadi, apa tujuan memperkenalkan soal model penalaran dalam UN?

Tujuan memperkenalkan soal model penalaran atau HOTS dalam asesmen adalah untuk mendorong siswa melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses hapalan, tanpa mengetahui konsep keilmuan.

Berapa persen porsi soal model penalaran dalam UN?

Soal-soal UN terdiri dari 3 level, yaitu level 1 (pemahaman) sebanyak 25-30 %, level 2 (aplikasi) sebanyak 50-60 %, dan level 3 (penalaran) 10-15 %. Bila dibandingkan antara soal UN dan PISA, presentase soal penalaran pada soal PISA lebih banyak yaitu 25 %. Presentase level 1, 2, 3, pada PISA masing-masing 25 %, 50 %, dan 25 %.

Penerapan soal model penalaran dalam UN mendapat banyak reaksi dari siswa dan masyarakat, sebagaimana muncul dalam media sosial. Apa komentar Bapak?

Munculnya komentar di media sosial dari para siswa yang tidak bisa menjawab soal Matematika tersebut perlu disikapi dengan positif. Secara pribadi, saya mengapresiasi mereka yang mencurahkan isi hati di media sosial dengan menggunakan kata-kata yang santun dan sopan. Tidak ada kata-kata yang sifatnya menghujat atau mencemooh. Artinya, mereka telah menerapkan hasil pendidikan karakter dalam menyikapi soal model penalaran tersebut.

Namun, di sisi lain, kami di BNSP menyadari betul bahwa prinsip kontekstual dan stimulus yang dipersyaratkan dalam menyusun soal model penalaran itu yang belum diterapkan dengan benar dalam penyusunan soal UN Matematika SMA.

Misalnya soal terkait dengan jumlah garam NaCl yang ada dalam 1 ton bola salju. Demikian juga soal tentang dadu yang diputar 600 kali atau

waktu yang diperlukan oleh paku untuk tenggelam dalam agar-agar.

Soal-soal tersebut jelas di luar konteks. Negara kita merupakan negara tropis, tidak pernah ada salju. Demikian juga, apa manfaat dari memutar dadu sampai 600 kali. Agar-agar itu makanan pencuci mulut, masa sih, paku ditenggelamkan dalam agar-agar. Konteks apa yang dipakai?

Kebijakan asesmen yang mengarah kepada soal model penalaran perlu diimbangi dengan kemampuan guru dalam menyusun soal yang bersifat HOTS. Program *in-house training* bagi guru-guru perlu diintensifkan.

Apa langkah-langkah menyusun soal model penalaran?

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun soal model penalaran. Pertama, menganalisis KD yang dapat dibuatkan soal model penalaran. Menyusun kisi-kisi soal. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Menulis butir pertanyaan pada kartu soal sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir pertanyaan ditulis agar sesuai dengan kaidah penulisan butir soal. Terakhir, membuat pedoman penskoran atau kunci jawaban.

Apakah soal model penalaran hanya ada pada mata pelajaran Matematika?

Soal model penalaran tidak hanya diterapkan dalam mata pelajaran Matematika, tetapi dapat diterapkan di pelajaran lain, seperti Biologi, Fisika, Kimia, Bahasa, Sejarah, dan seterusnya. Penerapan soal model penalaran untuk pelajaran itu harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran dan tingkat perkembangan psikologis siswa.

Bagaimana mekanisme penskoran soal model penalaran?

Untuk mendorong berkembangnya soal model penalaran, penskoran soal akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas soal. Soal yang lebih kompleks diberi bobot yang lebih tinggi.

Siapa yang terlibat dalam penyusunan soal UN, termasuk soal model penalaran?

Soal UN disusun oleh guru-guru yang terlatih dan berpengalaman serta ditelaah oleh dosen dari

perguruan tinggi. Ada uji coba soal UN dengan mempertimbangkan karakteristik sekolah dan daerah. Soal disusun berdasarkan kisi-kisi UN. Kisi-kisi disusun mengacu kepada kompetensi dasar (KD) yang ada di dalam kurikulum, standar isi, dan standar kompetensi lulusan.

Kisi-kisi dibuat generik, mencakup lingkup materi dan level kognitif. Sejak tahun 2015 terakhir ini, kisi-kisi dibuat umum/generik. Tidak spesifik mengarahkan ke suatu bentuk soal tertentu. Tujuannya agar pembelajaran di sekolah tidak terjebak pada proses drilling soal UN. Guru wajib mengajarkan materi pembelajaran dengan mengedepankan pemahaman konsep, bukan sekedar drilling soal. Berdasarkan kisi-kisi yang bersifat generik, dapat disusun soal yang bervariasi (kedalaman materi dan tingkat kesulitan)

Apa tindak lanjut yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan?

Sebagaimana tahun lalu, hasil UN ini akan dianalisis untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran UN. Hasil analisis didistribusikan ke semua Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu pembelajaran.

Analisis hasil UN perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan, mulai dari Pusat sampai ke Daerah dan Satuan Pendidikan.

Guru hendaknya menjadikannya alat refleksi dan acuan untuk peningkatan kompetensinya. Saya berharap hasil ujian ini dapat menjadi “cermin” yang jujur, dan yang terpenting dapat menjadi pendorong perbaikan mutu pembelajaran.

Ada pesan khusus terkait pelaksanaan dan hasil UN tahun ini?

Masalah UN perlu disikapi secara obyektif dari perspektif akademik. Jangan dipolitisir. UN mengukur apa yang seharusnya dikuasai siswa, bukan hanya mengukur apa yang sudah diajarkan guru. UN bagi anak didik adalah bagian dari pendidikan. Maka hindarkan dan cegah semua upaya yang mengarah pada ketidakjujuran, karena itu jelas akan mengingkari hakikat pendidikan. ●

SELAMAT DATANG BAPAK, KAMI INGIN MAJU BERSAMA

Catatan Kunjungan Kerja Mendikbud ke Sekolah di Manggarai Barat



Muhadjir Effendy Mendikbud (memakai kopiah khas Manggarai) didampingi Maria A Kusuma Kepala Sekolah (berbaju putih), berpose bersama siswa SD Inpres Manggarai Barat. Mereka sangat semangat dan antusias dan menyampaikan 'Salam Literasi' sebagai bentuk motivasi untuk berprestasi di tengah-tengah keterbatasan yang ada.

Selamat datang Bapak
Selamat datang Bapak
Selamat datang kami ucapkan
Selamat datang Bapak
Selamat datang Bapak
Terimalah salam dari kami
yang ingin maju bersama-sama

Demikian lirik lagu yang dinyanyikan siswa-siswa SD Inpres Waemata Manggarai Barat untuk menyambut kedatangan Muhadjir Effendy Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan bersama rombongan. Di satu sisi, lirik lagu tersebut menggambarkan antusiasme dan semangat para siswa yang siang itu memakai seragam pramuka. Di sisi lain, lirik tersebut juga merupakan curahan hati yang tulus dari para siswa untuk mendapatkan perhatian dan kemajuan dalam bidang pendidikan.

Panasnya cuaca di Labuan Bajo, Manggarai Barat pada Rabu siang (4/4/2018) tidak mengurangi semangat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Muhadjir Effendy Mendikbud dan Totok Suprayitno Kepala Balitbang dengan disaksikan oleh Maria Geong Wakil Bupati Manggarai Barat, menerima atribut slendang khas Manggarai sebagai bentuk penghormatan dan ucapan selamat datang dari siswi SMKN 1 Manggarai Barat.

bersama rombongan untuk melakukan kunjungan kerja ke beberapa sekolah, mulai dari SD sampai SMA dan SMK. Meskipun fokus utama kunjungan kerja kali ini adalah monitoring pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMK yang digelar sejak tanggal 2-5 April 2018, Mendikbud juga mengunjungi SD dan SMA.

Turut mendampingi Mendikbud dalam kunjungan kerja ke Manggarai Barat adalah Maria Geong Wakil Bupati, Rofinus Mbon Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Muhammad Irfan Kepala LPMP NTT dan para pejabat pemerintahan lainnya. Sedangkan dari Kemdikbud yang turut serta adalah Totok Suprayitno Kepala Balitbang, Hamid Muhammad Dirjen Dikdasmen, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Bakrun Direktur Pembinaan SMK, Muhammad Abduh Kepala Puspendik, Alfa Staf Khusus Menteri Bidang Monitoring, Tim TV Edukasi dan sekretariat Ujian Nasional.

Setelah selesai menyanyikan lagu selamat datang, Ibu Maria A Kusuma Kepala SD Inpres

tersebut memberi sambutan singkat.

“Bapak Menteri yang kami hormati. Kami sangat bersenang hati atas kunjungan Bapak Menteri hari ini. Inilah sekolah kami. Di sini ada 591 siswa dengan 29 guru, 3 orang tenaga kependidikan, dan 16 ruang kelas. Tetapi ruang belajar kami kurang layak. Mohon Bapak Menteri berkenan membantu kami”, seraya mempersilahkan Mendikbud untuk berfoto bersama para siswa sebagai bentuk kedekatan emosional dan untuk memotivasi mereka dalam belajar.

Usai memberikan sambutan, Maria A Kusuma mengajak rombongan untuk melihat ruang kelas yang ada. Di SD Inpres ini ada ruang kelas besar, tetapi dinding dan atapnya sudah rusak. Demikian juga, kursi dan meja sudah kurang layak pakai. Bahkan ada dua ruang kelas seperti gerbong kereta api karena lokasinya di lorong antar dua bangunan, dengan panjang 6 meter dan lebar 2 meter, diisi 33 siswa. Sangat memprihatinkan. Namun demikian, keceriaan dan antusiasme tidak pernah pudar dari

murid-murid SD Inpres tersebut.

Meskipun dalam kondisi serba terbatas, antusiasme para siswa, guru dan masyarakat setempat sangat luar biasa. Di setiap sekolah, rombongan selalu disambut dengan tarian adat dan penyematan atribut khas masyarakat Manggarai. Acara dipimpin oleh ketua adat masyarakat setempat dengan menyematkan kopiah, selendang, dilanjutkan dengan penyerahan kendi (tempat air dari kayu) dan ayam jantan warna putih.

“Ayam berwarna putih merupakan simbol dari ketulusan hati kami dalam menerima tamu, khususnya Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beserta rombongan. Ayam jantan berkokok setiap saat, mengandung makna sebuah ajakan untuk bangun dari tidur dan bangkit kembali untuk belajar di kalangan siswa sekolah”, ucap seorang kepala adat ketika menjelaskan filosofi tari adat penyambut tamu.

Kondisi SMAN 2 Labuan Bajo dengan jumlah siswa 372 anak, tidak jauh berbeda dari kondisi SD Inpres tersebut. Minggu depan, mulai tanggal 9-12 April, SMA ini akan melaksanakan UN yang diikuti oleh 104 siswa. Karena keterbatasan fasilitas, UN masih dilaksanakan dengan moda berbasis kertas dan pensil.

Setelah melihat ruang kelas, rombongan diajak melihat ruang guru. “Ini ruang guru, sekaligus sebagai ruang serba guna”, ucap kepala SMAN 1 kepada Pak Menteri dan rombongan.

Penulis ketika mendengar ucapan tersebut sangat antusias untuk mengetahui lebih detail seperti apa kira-kira ruang guru yang juga ruang serba guna tersebut. Namun, setelah memasuki ruangan, apa yang penulis bayangkan berbalik 360 derajat. Di dalam ruang itu ada berbagai macam perabot dan peralatan. Di sudut sebelah kiri dari pintu masuk, ada empat kasur yang digelar di atas lantai. Kemungkinan kasur ini dimanfaatkan untuk istirahat jika ada siswa yang sakit.

Menuju ke sisi lain, ada satu rak yang penuh dengan buku-buku lawas dan berdebu. Tidak layak dibaca lagi. Di dekat rak buku itu, terdapat kompor minyak tanah, panci dan peralatan masak.

Sementara di atas meja dekat jendela, ada lima set komputer ngangkak yang tidak bisa difungsikan. Lantainya pun nampak kotor, tidak selayaknya untuk sebuah ruang guru. Singkat cerita, ruang itu bak sebuah gudang untuk barang-barang rongsoan. Barangkali inilah yang menjadikannya sebagai ruang serba guna.

Ketika penulis melakukan klarifikasi kepada kepala sekolah, dengan tenang ia menjelaskan bahwa apa yang ada merupakan kondisi riil. Sekolah tidak melakukan persiapan khusus untuk menyambut kedatangan Menteri dan rombongan, kecuali spanduk ucapan selamat datang yang dipasang di pintu gerbang sekolah.

“Kami ingin menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Maka kami tidak melakukan persiapan khusus”, ucap kepala sekolah seraya menambahkan di sekolahnya ada 372 siswa dan 104 siswa yang mengikuti UN tahun ini dengan moda berbasis kertas dan pensil.

Sementara itu, kondisi SMKN 2 Komodo, juga sangat memprihatinkan. Siswa sekolah ini sebanyak 123 orang dan hanya 20 orang yang mengikuti UN tahun ini dengan moda berbasis kertas dan pensil. SMK ini memiliki dua kompetensi keahlian, yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Kendaraan Ringan. Namun, sangat miris sekali, sambungan listrik baru masuk ke sekolah tersebut dua bulan yang lalu. Bagaimana program pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan kompetensi lulusan bisa dicapai jika sarana dan prasarana tidak mendukung kompetensi keahlian yang ada.

Kondisi Ruang Praktik Siswa (RPS) untuk Teknik Kendaraan Ringan juga masih jauh dari standar sarana dan prasarana yang ditetapkan BSNP. Di dalam ruang itu ada tiga buah sepeda motor untuk praktik dan dua mesin gen set serta peralatan sekedarnya saja. Pintu dan jendela tidak terawat, sehingga penuh dengan debu. Dengan fasilitas yang sangat minim dan kurang terawat, sulit bagi siswa untuk dapat melakukan pembelajaran dengan baik.

Selain masalah perawatan dan pemanfaatan fasilitas, Mendikbud juga merasa prihatin dengan

NTT termasuk salah satu provinsi yang memerlukan tindakan afirmasi untuk percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi juga perlu ada program afirmasi dari Pemerintah Daerah.

**-- Muhadjir Effendy
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan--**

kebiasaan coret menyoret di dinding kelas dan fasilitas sekolah lainnya, seperti meja, kursi dan toilet.

“Tolong dijaga kebersihan sekolah. Jangan di biarkan anak-anak menyoret-nyoret dinding, meja dan kursi”, pesan Mendikbud kepada kepala sekolah sebelum meninggalkan lokasi.

Selain berkunjung ke SD Inpres dan SMAN 2, Mendikbud dan rombongan juga memantau di dua SMK yang melaksanakan UNBK, yaitu SMKN 1 dan SMK Stella Maris, satu-satunya sekolah swasta yang sempat dikunjungi Menteri. Kondisi kedua sekolah ini relatif lebih bagus dari sekolah yang lain. SMKN 1 memiliki luas lahan 16 hektar dengan 404 siswa dan 46 ruang kelas.

“Sejak tahun 2017, SMKN 1 telah melaksanakan UNBK. Ada lima ruang yang digunakan ujian

dengan tiga sesi dalam sehari. Bahkan SMKN 1 juga telah mendapatkan lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Level 1 (LSP-1) dari BNSP”, ucap Stefanus Satu kepala SMKN 1.

Sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Menteri kepada kegiatan ekstra kurikuler kesiswaan, Muhadjir Effendy memberikan bantuan kepada OSIS SMAN 2 dan SMK Stella Maris, mewakili sekolah negeri dan swasta. Bantuan uang tunai tersebut diserahkan kepada Ketua OSIS dan disaksikan oleh para siswa yang lain.

Menurut Mendikbud NTT termasuk salah satu provinsi yang memerlukan tindakan afirmasi untuk percepatan peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dalam pelaksanaannya, sekolah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat, tetapi juga perlu ada program afirmasi dari Pemerintah Daerah.

Dari kunjungan kerja ini, dapat disarikan bahwa akses dan kualitas pendidikan nasional belum merata antar wilayah. Disparitas antar daerah masih terasa sangat jelas antara kondisi di pulau Jawa dengan kondisi di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten yang masih mengalami disparitas tersebut adalah Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Bahkan disparitas antar sekolah di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat masih terasa kental. Artinya, pendidikan berbasis standar yang menjadi ruh dari sistem pendidikan nasional, belum ‘membumi’ di wilayah NKRI.

Siapa yang bertanggungjawab? Pemenuhan akses dan kualitas pendidikan sebagai implementasi dari standar nasional pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Kepala Balitbang Kemdikbud, Totok Suprayitno menganalogikan posisi Pemerintah Daerah bagi sekolah ibarat orang tua, sedangkan posisi Pemerintah Pusat ibarat paman. Hal ini karena izin operasional dan pembinaan ada di Pemerintah Daerah. Dengan adanya koordinasi dan partisipasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat, diharapkan akses dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Amin. ●(BS)

PENERAPAN SOAL MODEL PENALARAN DALAM UJIAN NASIONAL PERLU DIIMBANGI DENGAN PENINGKATAN KEMAMPUAN GURU DAN SISWA

Ujian Nasional (UN) untuk jenjang SMK dan SMA/MA tahun pelajaran 2017/2018 telah dilaksanakan pada tanggal 2-5 April dan 9-12 April 2018. Secara umum, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk jenjang SMK dan SMA/MA relatif lebih lancar dan tertib dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah pengaduan yang masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga lebih sedikit. Namun masih ada beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan pasokan listrik dan jaringan internet yang pada akhirnya dapat diatasi. Penerapan soal model *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) pada mata pelajaran matematika SMA/MA yang dirasakan terlalu sulit, mendapat banyak respon dari peserta ujian dan menjadi viral di media sosial. Kebijakan penerapan soal model HOTS dimaksudkan untuk melatih anak-anak berpikir kritis, kreatif, dan analitis, namun ada prinsip-prinsip HOTS yang belum sepenuhnya diterapkan dalam menyusun soal ujian. Oleh karena itu penerapan soal model HOTS dalam UN perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar.

Demikian catatan penting dari rapat koordinasi

evaluasi pelaksanaan UNBK pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Jumat, 20 April 2018 di Jakarta. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Wijaya Kusumawardhana Asisten Deputi Pendidikan Mengengah dan Keterampilan Bekerja. Turut hadir dalam acara ini Bambang Suryadi Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Awaludin Tjalla Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, wakil dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Direktorat Pembinaan SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Tujuan evaluasi pelaksanaan UNBK ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan UNBK dan untuk merespon banyaknya tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan UNBK tersebut, sehingga kita bisa melakukan perbaikan pada pelaksanaan UN di masa depan”, ucap Wijaya Kusumawardhana mengawali sambutannya.

Secara umum, tambah Wijaya, pelaksanaan UNBK tahun ini berjalan lebih lancar dan tertib,,

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa masih ada kendala teknis seperti pemadaman listrik, keterlambatan pengunduhan token, keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, serta server yang tiba-tiba tidak berfungsi, tidak bisa dinafikan. Tapi, alhamdulillah, akhirnya masalah tersebut dapat diatasi. Untuk perbaikan pelaksanaan UNBK ke depan, kita perlu mengidentifikasi masalah dan keluhan masyarakat atas pelaksanaan UNBK 2018.

“Selain permasalahan teknis tersebut, isu yang yang mendapat sorotan masyarakat adalah soal Matematika jenjang SMA/MA yang dirasakan terlalu sulit, sehingga banyak beredar keluhan di media sosial. Demikian juga adanya keluhan soal UN yang tidak sesuai dengan kisi-kisi dan soal uji coba atau *try out*”, ucap Wijaya sambil menambahkan perlunya penjelasan tentang hal ini kepada masyarakat.

Sementara itu, Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam paparannya mengatakan bahwa telah menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menerapkan soal yang mendorong peserta didik untuk melakukan penalaran, tidak hanya sekedar pemahaman dan penerapan.

“Asesmen nasional diarahkan kepada model asesmen yang menuntut kemampuan berpikir yang tidak hanya mengingat (*recall*), menyatakan kembali (*restate*), atau merujuk tanpa melakukan pengolahan (*recite*). Inilah yang disebut dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *higher order thinking skills* (HOTS)”, ucap Bambang seraya menambahkan ada beberapa prinsip HOTS yang belum diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan soal UN.

Lebih lanjut Bambang mengatakan prinsip kontekstual dengan kehidupan nyata belum diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan soal Matematika. Misalnya, soal terkait dengan jumlah garam NaCl yang ada dalam 1 ton bola salju. Demikian juga tentang soal dadu yang diputar 600 kali atau waktu yang diperlukan oleh paku untuk tenggelam dalam agar-agar.

“Soal-soal tersebut jelas di luar konteks. Negara kita merupakan negara tropis, tidak pernah ada

salju. Demikian juga, apa manfaat dari memutar dadu sampai 600 kali”, ucap Bambang.

Tujuan soal model HOTS dalam asesmen, tambah Ketua BSNP, adalah untuk mendorong siswa melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses hapalan, tanpa mengetahui konsep keilmuan. HOTS merupakan salah satu tuntutan keterampilan dalam pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif.

“Anak-anak kita tidak akan berdaya saing jika di sekolah tidak dilatih kecakapan hidup abad 21. Asesmen modal HOTS juga dilakukan untuk



**Perlu dilakukan
penyelarasan antara
proses pembelajaran
dan penilaian dengan
mengacu kepada standar
nasional pendidikan.
Semangat yang ada
di dalam Kurikulum
2013 adalah untuk
meningkatkan daya nalar
siswa, termasuk berpikir
kritis dan analitis.**

**--Awaluddin Tjalla
Kepala Pusurbuk--**



Suasana rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin oleh Wijaya Kusumawardhana Asisten Deputi Pendidikan Mengenah dan Keterampilan Bekerja, pada hari Jumat, 20/4/2018.

mengejar keterbelakangan bangsa Indonesia di tingkat internasional, khususnya yang terkait dengan hasil *Program for International Student Assessment* (PISA) yang diselenggarakan tiga tahun sekali”, ucap Ketua BSNP yang tidak menafikan kenyataan bahwa kemampuan guru-guru dalam menyusun soal model HOTS masih perlu ditingkatkan.

BSNP telah berkoordinasi dengan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa untuk mendorong berkembangnya soal model HOTS ini, penskoran soal dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas soal. Soal yang lebih kompleks diberi bobot yang lebih tinggi. Dengan demikian akan ada faktor pembeda antara siswa yang mampu menjawab soal model HOTS dan siswa yang hanya mampu menjawab soal yang mudah atau sedang.

Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk menyam-

paikan perlunya dilakukan penyelarasan antara proses pembelajaran dan penilaian dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan. Semangat yang ada di dalam Kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan daya nalar siswa, termasuk berpikir kritis dan analitis.

“BSNP yang mengembangkan standar, Puskurbuk yang bertanggungjawab terhadap implementasi kurikulum, dan Puspendik yang bertanggungjawab terhadap penilaian pendidikan, perlu duduk bersama untuk membahas permasalahan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional”, ucap Kepala Puskurbuk seraya menambahkan salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan UN tahun 2018 adalah perlunya refleksi dan evaluasi internal dari beberapa fenomena yang muncul dalam pelaksanaan ujian.

●(BS)

HARAP SENANG ADA UJIAN NASIONAL

Praktik Baik Pelaksanaan UNBK di Mimika Papua



Pemantauan UNBK di SMPIT Permata, Mimika Papua (24/4/2018). Sesi foto bersama Kepala Balitbang Totok Suprayitno (ketiga dari kanan), Kepala LPMP Papua Barat (ketiga dari kiri), Muhammad Abduh Kepala Puspendik (keempat dari kiri), Arifin Kepala SMPIT Pertama (keempat dari kanan), dan Bambang Suryadi Ketua BSNP (kedua dari kanan).

Hari kedua pelaksanaan UN SMP/MTs (24/4/2018), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama Sekretaris Jenderal dan Direktur Pembinaan SMP, melakukan

kunjungan kerja ke Tembaga Pura Mimika, Papua. Sementara itu Kepala Balitbang, Ketua BSNP dan Kepala Puspendik melakukan pemantauan ke SMPIT Permata dan Yayasan Pendidikan Jayawijaya

(YPJ) di Mimika Papua. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMPIT Permata diikuti oleh 38 siswa yang terbagi dalam dua sesi sehari. Sekolah ini dikelola oleh Yayasan Assalam. Jenjang SD memiliki 440 siswa dan jenjang SMP memiliki 143 siswa. Ada 17 orang guru SD dan 32 orang guru SMP.

Selama melakukan pemantauan, ada praktik baik yang dilakukan pihak sekolah yang berdiri pada tahun 2012. Di bagian depan gedung sekolah terpampang spanduk dengan tulisan “Harap Senang Ada Ujian, Selamat Menempuh USBN dan UNBK”. Hal ini berbeda dengan di sebagian besar sekolah lain. Biasanya pesan yang ditulis adalah “Harap Tenang. Ada Ujian Nasional”.

Menurut Arifin Kepala Sekolah, melalui pesan tersebut pihak sekolah ingin mengubah *mind set* siswa. “Selama ini UN dikaitkan dengan suasana yang mencemaskan bahkan menegangkan, sehingga semua usaha difokuskan kepada ujian. Di sini kami ingin membuat anak-anak senang karena ujian merupakan bagian dari proses pendidikan yang mesti dilalui”, ucap pria asal Lumajang yang

nota bene merupakan alumni Universitas Brawijaya tersebut.

Selain itu, tambah Arifin, selama empat hari pelaksanaan UNBK, orang tua murid secara suka rela menyediakan makanan untuk makan siang di sekolah. Sekitar enam puluh persen orang tua siswa di sekolah ini adalah karyawan PT Free Port.

Kebersihan lingkungan sekolah sangat diperhatikan. Setiap orang yang berkunjung, termasuk tim pemantau UNBK dari Kemdikbud, harus melepas sepatu ketika memasuki gedung sekolah. Demikian juga para siswa dan guru.

Sementara itu, suasana di SMP Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) yang dikelola PT Free Port sangat berbeda. Sekolah ini berada di kota Kuala Kencana. Sebuah kota di tengah hutan yang didesain dan dikelola oleh PT Free Port. Desain bangunan dan lanskap dibuat seperti di kota besar di luar negeri.

Di sekolah yang didirikan tahun 1995 ini, selama UNBK berlangsung, siswa kelas VII dan VIII tetap masuk seperti biasa untuk mengikuti

Selama ini UN dikaitkan dengan suasana yang mencemaskan bahkan menegangkan, sehingga semua usaha difokuskan kepada ujian. Di sini kami ingin membuat anak-anak senang karena ujian merupakan bagian dari proses pendidikan yang mesti dilalui.

--Arifin
Kepala Sekolah SMPIT Permata, Mimika, Papua--



Kepala Balitbang Totok Suprayitno (kedua dari kanan), didampingi Bambang Suryadi Ketua BSNP (kedua dari kanan) dan Muhammad Abduh Kepala Puspendik (paling kanan) mengamati pernyataan tentang visi, tujuan, dan nilai di SMP Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) Kuala Kencana, Timika Mimika Jayapura. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka untuk pemantauan pelaksanaan UNBK di SMP YPJ yang dikelola oleh PT Free Port Indonesia.

proses pembelajaran. Kebijakan ini diambil untuk mengoptimalkan waktu belajar di sekolah. Sebab di Papua banyak hari libur, baik libur nasional maupun libur daerah.

“Di Papua banyak hari libur. Selain hari libur nasional juga ada hari libur daerah, seperti libur keagamaan atau adat”, ucap Nur Salim Kepala SMP YPJ. ●(BS)

PUSPENDIK LAKUKAN REVIU KISI-KISI USBN

Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan reviu kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2018 di Jakarta. Reviu dilakukan untuk tiga mata pelajaran, yaitu Keterampilan, Seni dan Budaya, serta Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Kegiatan ini melibatkan widiaiswara dari P4TK, Puskurbuk, dan BSNP.

Menurut Asrijanty Kepala Bidang Penilaian Akademik, Puspendik, tujuan kegiatan ini adalah untuk menelaah kembali kisi-kisi USBN tahun 2018 untuk tiga mata pelajaran, yaitu Keterampilan, Seni dan Budaya, serta PJOK. Hal ini dilakukan untuk perbaikan terhadap kisi-kisi tiga mata tersebut setelah dilakukan evaluasi terhadap kisi-kisi untuk tiga mata pelajaran tersebut.

“Kami di Puspendik selalu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan USBN, sehingga kami melaksanakan kegiatan reviu kisi-kisi untuk tiga mata pelajaran ini, yaitu Keterampilan, Seni dan Budaya, serta PJOK”, ucap Asrijanty dalam sambutannya mewakili Kepala Puspendik.

Kisi-kisi tersebut, tambah Asrijanty, disusun oleh tim dari para guru yang berpengalaman yang dibentuk oleh direktorat terkait, ditelaah oleh Puspendik dan ditetapkan oleh BSNP. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa reviu dilakukan pada tiga mata pelajaran ini? Bagaimana dengan mata pelajaran yang lain?

Lebih lanjut Asrijanty mengatakan seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh mata pelajaran diujikan dalam USBN, maka tidak akan terjadi lagi

sikap favoritisme di kalangan siswa terhadap mata pelajaran tertentu, termasuk mata pelajaran Keterampilan, Seni dan Budaya, serta PJOK. Namun, karena karakteristik tiga mata pelajaran ini berbeda dari mata pelajaran lain, maka soal USBN sepenuhnya disusun oleh guru berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan BSNP. Berdasarkan hasil evaluasi Puspendik, kisi-kisi tiga mata pelajaran ini perlu diperbaiki.

“Semoga dengan diujikannya semua mata pelajaran dalam USBN, meskipun tidak ada soal dari Pusat untuk tiga mata pelajaran ini, tidak terjadi

Seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa seluruh mata pelajaran diujikan dalam USBN, maka tidak akan terjadi lagi sikap favoritisme di kalangan siswa terhadap mata pelajaran tertentu, termasuk mata pelajaran Keterampilan, Seni dan Budaya, serta PJOK.

**--Asrijanty,
Kepala Bidang Penilaian
Akademik Puspendik--**



Peserta kegiatan reviu kisi-kisi USBN menyimak paparan materi dari para nara sumber tentang kebijakan penilaian dan kurikulum. Melalui kegiatan ini akan dihasilkan kisi-kisi USBN untuk tiga mata pelajaran, yaitu Keterampilan, Seni dan Budaya, serta PJOK.

favoritisme di kalangan siswa di sekolah. Dengan demikian, guru dan murid tetap memberikan perhatian yang sama terhadap semua mata pelajaran”, tambah Asrijanty seraya menambahkan untuk kisi-kisi mata pelajaran lain telah dilakukan pada bulan Februari dan Maret yang lalu.

Sementara itu Bambang Suryadi Ketua BSNP menyampaikan kebijakan penilaian berdasarkan standar penilaian. USBN merupakan bentuk penilaian oleh satuan pendidikan dan posisi USBN saat ini sangat penting dan strategis karena menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Namun, kualitas soal USBN perlu ditingkatkan dan salah satu caranya adalah melalui penyusunan kisi-kisi.

“Jika selama ini guru cenderung membuat soal berdasarkan materi yang sudah diajarkan, maka melalui USBN ini guru diharapkan membuat soal berdasarkan kompetensi yang seharusnya dikuasai siswa jika mereka tamat dari jenjang pendidikan tertentu”, ucap Bambang.

Terkait dengan bentuk kisi-kisi, Ketua BSNP mengatakan bahwa format kisi-kisi UN dan USBN sengaja dibuat generik yang mencakup lingkup materi dan level kognitif. Tidak ada lagi

indikator kompetensi dasar yang dijadikan acuan penulisan soal, sebab hal ini dapat mereduksi esensi proses pembelajaran yang hanya dilakukan dalam bentuk *drilling to the test*. Kisi-kisi USBN yang bersifat generik ini mesti dijadikan guru dalam menuntaskan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berjalan.

“Supaya kisi-kisi yang generik ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan soal, maka peran Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) adalah membuat indikator berdasarkan kisi-kisi tersebut”, ujar Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Sri Hidayati Kepala Bidang Kurikulum Puskurbuk menyampaikan materi tentang relevansi kurikulum dengan penilaian. Menurut Ida, panggilan akrabnya, bagaimana penilaian dilakukan akan memengaruhi proses pembelajaran di kelas. Jika selama ini penilaian hanya dilakukan dalam bentuk pilihan ganda, maka proses pembelajaran juga cenderung dilakukan dengan proses menghafal. Oleh karena itu, mulai tahun ini, soal USBN tidak hanya mencakup model soal pilihan ganda, tetapi juga mencakup soal uraian atau esai. ●(BS)

SEBANYAK 197 PENULIS ANTUSIAS IKUT PELATIHAN PENULISAN BUKU TEKS PELAJARAN DI SOLO

Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Daerah Jawa Tengah bekerja sama dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penulisan Buku Teks Pelajaran Kurikulum 2013 Jenjang SMP dan SMA di Solo pada hari Sabtu, 5 Mei 2018. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Umum Pengurus Pusat IKAPI dan diikuti 197 peserta dari Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, dan Sumatera Barat.

M. Nurkholis Ridwan Sekretaris Umum IKAPI dalam sambutannya mengatakan kegiatan pelatihan ini merupakan amanat musyawarah IKAPI, yaitu salah satu tugas IKAPI adalah memfasilitasi para penulis dalam meningkatkan kualitas perbukuan di

Indonesia. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari ekosistem perbukuan yang dibangun oleh IKAPI.

“IKAPI terus meningkatkan ekosistem perbukuan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, penerbit, dan penulis. Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan minat baca. Sebab tanpa buku teks pelajaran yang berkualitas, sulit untuk dapat meningkatkan minat baca”, ucap Sekretaris Umum IKAPI tersebut.

Lebih lanjut Nurkholis mengatakan penulis merupakan mitra strategis IKAPI. Sebagai upaya untuk menghasilkan buku teks pelajaran, maka penulis harus memahami ruh Kurikulum 2013, selain harus memiliki pengetahuan dan kompetensi pada bidang yang akan ditulis.

Tomy Utomo Putro Ketua IKAPI Jawa Tengah

IKAPI terus meningkatkan ekosistem perbukuan dengan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, penerbit, dan penulis. Hal ini dilakukan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan minat baca. Tanpa buku teks pelajaran yang berkualitas, sulit untuk dapat meningkatkan minat baca.

**--M. Nurkholis Ridwan
Sekretaris Umum IKAPI--**



Ketua BSNP, Sekretaris Umum IKAPI, Ketua IKAPI Jawa Tengah dan para nara sumber berpose setelah pembukaan. Dari kiri ke kanan, Ariantoni, M. Nurkholis Ridwan Sekretaris Umum IKAPI, Supriyatno Kabid Perbukuan Puskurbuk, Tomy Utomo Putro Ketua IKAPI Jawa Tengah, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Suhaini M. Saleh, Regina Niken, Ana Ratna Wulan, Sardiman AM, dan Wawan Suherman. Nara sumber yang tidak nampak dalam gambar M. Syaifuddin dan Kokom Komalasari.

mengatakan kegiatan ini diikuti oleh 197 peserta dari daerah Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan yang didesain dengan pola bimbingan teknis berdasarkan kelompok mata pelajaran, tidak lagi berdasarkan jenjang pendidikan seperti pada pelatihan tahun lalu.

“Pola pelatihan tahun ini sengaja kami desain berbeda dengan pola pelatihan tahun lalu. Tahun ini kelompok pelatihan dibuat berdasarkan mata pelajaran, tidak berdasarkan jenjang pendidikan”, ucap Tomy seraya menambahkan ada delapan kelompok mata pelajaran yang mencakup Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKn, PJOK dan Sejarah Indonesia.

Dari delapan kelompok mata pelajaran tersebut, tambah Tomy, dua mata pelajaran yang paling banyak pesertanya adalah Matematika dan Bahasa Indonesia, yaitu 32 dan 30 orang untuk masing-masing kelompok. Sedangkan peserta yang paling

sedikit adalah mata pelajaran PPKn dan PJOK dengan peserta 16 orang untuk masing-masing kelompok. Peserta untuk mata pelajaran lain berkisar antara 19 sampai dengan 27 peserta.

Lebih lanjut Tomy menjelaskan dari segi teknis pelaksanaan, pelatihan dibagi menjadi empat sesi. Sesi pertama dilakukan secara panel dengan nara sumber dari Puskurbuk dan BSNP. Sedangkan sesi pelatihan kelompok dilakukan dalam tiga sesi, dengan durasi dua jam untuk setiap sesi dan acara akan berakhir pada pukul 17.00. Di setiap kelompok ada satu nara sumber. Mereka berasal dari Puskurbuk dan perguruan tinggi, yaitu UPI, UNY, Universitas Jember, dan Universitas Muhammadiyah Malang.

Nara sumber kelompok Bahasa Indonesia adalah Ariantoni dan untuk kelompok Bahasa Inggris adalah Suhaini M. Saleh. Nara sumber kelompok Matematika adalah M. Syaifuddin dan kelompok IPS adalah Regina Niken. Nara sumber

kelompok IPA adalah Ana Ratna Wulan dan untuk kelompok PPKn adalah Kokom Komalasari dan untuk kelompok PJOK adalah Wawan Suherman. Kelompok kedelapan, yaitu Sejarah yang menjadi nara sumber adalah Sardiman AM.

Selain ada pemaparan materi dari nara sumber, juga dilakukan bedah buku untuk mengulas bagaimana penilaian pada aspek materi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan dilakukan. Dengan cara ini, diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini penulis bisa menghasilkan buku yang berkualitas untuk diikutsertakan dalam proses penilaian.

Materi kebijakan tentang perbukuan disampaikan Supriyatno Kepala Bidang Perbukuan Puskurbuk. Menurutnya, ada sepuluh pelaku perbukuan, yaitu penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku.

“Dari sepuluh pelaku perbukuan ini, dalam konteks pelatihan hari ini, peran penerbit, penulis, dan editor sangat penting. Dari goresan pena merekalah buku yang berkualitas disiapkan sebelum dilakukan penilaian”, ucap Supriyatno seraya menambahkan mulai tahun 2017 Puskurbuk telah menerapkan sistem daring (*online*) untuk pendaftaran buku teks pelajaran yang diikutsertakan dalam penilaian.

Selain itu, Supriyatno juga menyampaikan beberapa isu strategis terkait dengan perbukuan. Diantaranya adalah isu pengawasan buku teks pelajaran di lapangan yang dirasa belum optimal. Isu kertas sebagai bahan buku, dimana sekitar enam puluh sampai dengan delapan puluh persen komponen buku ditentukan komponen kertas. Isu yang lain adalah terkait dengan penyusunan buku pendidikan agama.

Bambang Suryadi Ketua BSNP dalam paparannya menjelaskan tentang peran dan fungsi BSNP, keterkaitan antara standar nasional pendidikan dengan kurikulum, buku teks pelajaran, penilaian, dan peran guru. Bambang juga menyampaikan kebijakan penilaian buku teks pelajaran dengan pola inisiatif dari pemerintah dan pola inisiatif dari masyarakat.

Secara teknis, Ketua BSNP menyampaikan beberapa alasan mengapa buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak dalam proses penilaian. Materi ini yang lebih menarik dan mendapat perhatian dari para peserta pelatihan.

“Salah satu upaya yang mutlak dilakukan penulis untuk menghasilkan buku yang berkualitas adalah belajar dari kegagalan dan kesalahan. Oleh karena itu, dalam forum ini, kami sampaikan beberapa alasan mengapa buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak pada setiap tahap penilaian, mulai dari prapenilaian, penilaian tahap pertama, penilaian tahap kedua, sampai ke tahap *reviu*”, ucap Ketua BSNP.

Mengapa buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak? Menurut Ketua BSNP banyak alasan yang membuat sebuah buku teks pelajaran dinyatakan tidak layak. Secara umum, buku yang diusulkan masih lemah dalam menerapkan paradigma Kurikulum 2013.

“Buku tidak sesuai dengan paradigma K-13 dalam penyajiannya. Diduga penerbit tidak melibatkan editor yang memahami ruh (paradigma) K-13. Selain itu, buku tidak sesuai dengan pendekatan kurikulum 2013, misalnya pendekatan yang berbasis aktivitas, pendekatan ilmiah, dan penilaian yang mengarah kepada penalaran atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS)”, ucap Bambang seraya menambahkan masih ditemukan adanya unsur plagiasi.

Sebab lain, tambah Bambang adalah buku siswa bagus, tetapi buku guru tidak bagus. Buku siswa ditulis oleh pakar yang sangat ahli dalam bidangnya, tetapi buku guru tidak disiapkan dengan baik. Sementara kebijakan BSNP adalah untuk bisa dinyatakan layak, kedua buku baik buku siswa maupun buku guru harus dinyatakan layak.

Dari aspek penyajian, buku yang tidak layak disebabkan belum berbasis aktivitas dan penemuan, sajian contoh-contoh tidak berkesinambungan, penilaian terlalu umum, penjelasan tidak jelas, sajian tidak tuntut, dan tidak ada komunikasi interaktif antara penulis dengan siswa. ●(BS)

BSNP DAN PUSKURBUK MELAKSANAKAN PELATIHAN PENILAIAN BUKU TEKS PELAJARAN BAGI 467 GURU DAN DOSEN

Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan BSNP menyelenggarakan pelatihan bagi calon penilai buku teks pelajaran dari tanggal 11 sampai 13 Mei 2018 di Jakarta. Acara ini diikuti oleh 467 guru dan dosen dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Latihan penilaian dilakukan untuk Buku Teks Pelajaran (BTP) Tematik kelas I SD/MI mencakup 8 tema, kelas IV SD/MI mencakup 9 tema, BTP SMP/MTs dan SMA/MA untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, PJOK, Sejarah Indonesia, dan PPKn.

Awaluddin Tjalla Kepala Puskurbuk dalam laporannya mengatakan tujuan pelatihan ini adalah untuk menyamakan persepsi tentang kebijakan, mekanisme dan prosedur penilaian BTP di kalangan calon tim penilai, baik guru maupun dosen. Untuk mencapai tujuan tersebut, materi pelatihan dikemas dalam tiga aspek bentuk, yaitu penjelasan tentang kebijakan, mekanisme dan prosedur penilaian, paradigma kurikulum 2013, dan praktik menilai buku teks pelajaran.

Peserta pelatihan, tambah Awaluddin, ada yang pernah terlibat dalam penilaian buku teks pelajaran dan ada juga yang baru. Adapun perguruan tinggi asal peserta pelatihan, diantaranya adalah ITB, UNPAD, UI, UGM, UNAND, UPI, UNJ, UNY, UM, dan beberapa perguruan tinggi lain, baik negeri maupun swasta.

Selama mengikuti pelatihan, peserta didampingi dan dipandu langsung oleh tim pengembang instrumen. Khusus untuk praktik penilaian, peserta

dibekali dengan buku teks pelajaran sesuai dengan bidang keahliannya, lembar kerja, dan instrumen.

“Penetapan hasil pelatihan akan dilakukan dalam rapat pleno BSNP. Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus akan dilibatkan dalam penilaian buku teks pelajaran yang telah dinyatakan layak dalam kegiatan prapenilaian”, ucap Kepala Puskurbuk.

Ketua BSNP Bambang Suryadi dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu indikator peradaban sebuah bangsa ditandai dengan karya tulis dalam bentuk buku, termasuk buku teks pelajaran yang digunakan di satuan pendidikan. Peran penilai sangat strategis dalam menghasilkan buku yang berkualitas. Oleh karena itu, sebelum dilakukan penilaian, BSNP perlu melakukan pelatihan. Hanya mereka yang lulus pelatihan yang akan dilibatkan dalam proses penilaian buku teks pelajaran.

Salah satu kebijakan BSNP dalam penilaian adalah memberikan umpan balik hasil penilaian kepada penerbit untuk perbaikan. “Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi, hasil penilaian akan dikomunikasikan kepada penerbit, supaya terjadi proses pembelajaran dan perbaikan”, ucap Bambang.

Selain itu, tambah Bambang, mulai tahun 2017, pendaftaran buku yang diikuti dalam penilaian dilakukan secara daring (*online*). Hal ini dilakukan untuk mengurangi kontak fisik antar penerbit dan penyelenggara penilaian. Cara pendaftaran secara daring ini dinilai lebih efisien dan efektif dibandingkan cara manual yang selama ini dilakukan.



Peserta pelatihan penilai buku teks pelajaran menyimak penjelasan tim pengembang instrumen. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat diperoleh tim penilai yang kompeten dan kredibel sebagai upaya untuk menghasilkan buku teks pelajaran yang berkualitas.

Sementara itu, Zaki Su'ud koordinator kegiatan penilaian buku teks pelajaran menekankan pentingnya mewujudkan buku yang memenuhi prinsip *zero error*. Artinya, buku yang dinyatakan layak, harus terbebas dari kesalahan dalam hal isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam penilaian adalah kesesuaian buku teks pelajaran dengan paradigma Kurikulum 2013. Diantaranya adalah yang terkait dengan penerapan pendekatan penemuan, inkuiri, berbasis aktivitas, penalaran, dan asesmen autentik. "Sebaik apapun isi buku teks pelajaran, jika tidak memenuhi kriteria Kurikulum 2013, buku tidak bisa dinyatakan layak", ucap Zaki.

Totok Suprayitno Kepala Balitbang dalam pengarahannya menekankan tentang ekosistem perbukuan nasional. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, maka tuntutan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, sangat luar biasa karena buku yang dipergunakan di satuan pendidikan

harus melalui proses penilaian. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada kesalahan dari segi isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan.

Terkait dengan bentuk buku, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah mengupayakan selain dalam bentuk cetak, juga dalam bentuk elektronik. Dengan adanya buku elektronik, jika ditemukan kesalahan atau jika diperlukan revisi, maka proses perbaikan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

Secara teknis, setelah menerima materi pelatihan, calon penilai melakukan penilaian terhadap BTP. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan di setiap kelompok didampingi oleh tim pengembang instrumen. Penilaian terhadap calon penilai dilakukan pada dua aspek, yaitu proses dan kinerja. Aspek proses mencakup keaktifan dan keseriusan calon tim penilain selama mengikuti pelatihan. Aspek kinerja mencakup pemahaman calon penilain terhadap instrumen dan penggunaannya dalam melakukan penilaian BTP. ●(BS)

LEN SA



Bambang Suryadi Ketua BSNP (tengah) memberi penjelasan persiapan pelaksanaan Ujian Nasional 2018 kepada wartawan. Dari kiri ke kanan, Hamid Muhammad Dirjen Dikdasmen, Harris Iskandar Dirjen PAUD dan Dikmas, Bambang Suryadi Ketua BSNP, Totok Suprayitno Kepala Balitbang, dan Kiki Yuliati Sekretaris BSNP. Turut hadir dalam acara konferensi pers persiapan Ujian Nasional 2018 (13/3/2018) adalah Abdul Kahar Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan serta Dadang Sudiarto Sekretaris Balitbang.



Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan disambut dengan tarian khas Papua dalam kunjungan kerja untuk memantau pelaksanaan UNBK SMPN2 Timika (23/4/2018).

BSNP



Muhadjir Effendy Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (tengah) berpose bersama siswa SDN Sentra Pendidikan Timika, se usai memantau UN SMP (23/4/2018) . Sentra Pendidikan merupakan sekolah berasrama dengan mayoritas siswa suku asli Mimika.



Siswa SMPN 2 Mimika mengikuti UNBK pada sesi ketiga, Senin, 23 April 2018 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. UNBK di sekolah rujukan ini diikuti 480 siswa yang dibagi dalam tiga sesi sehari.

LEN SA



Didik Suhardi Sekretaris Jenderal Kemdikbud (keempat dari kiri) memandu acara konferensi pers tentang hasil Ujian Nasional SMA/MA dan SMK/MAK di Gedung A lantai dua Kemdikbud (30/4/2018). Penerapan soal model penalaran dalam UN perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan guru dalam melakukan proses belajar mengajar dan penilaian kelas.



Bambang Soedibyo Menteri Pendidikan Nasional periode 2004-2009 (berdiri) nara sumber diskusi "Pendidikan Berbasis Standar: Reflektif dan Prospektif" menyampaikan materi tentang pendidikan berbasis standar, di Jakarta (14/5/2018). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Indonesia menerapkan pendidikan berbasis standar.



Peserta diskusi “Pendidikan Berbasis Standar: Reflektif dan Prospektif” menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk mengawali acara diskusi (14/5/2018). Peserta diskusi berasal dari pejabat di Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, BAN S/M, guru, praktisi dan pemerhati pendidikan.

Selamat Idul Fitri

1 Syawal 1439 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

Keluarga Besar
Badan Standar Nasional Pendidikan



<http://www.bsnp-indonesia.org>

ISSN 0126-4605

